

BIAS NILAI PENDIDIKAN DALAM KONSTRUKSI SOSIAL MASYARAKAT BIMA

Imam Yuliadi

SMA Al Farabi – Bolo Bima NTB

Email: Uya259@yahoo.co.id

ABSTRACT

Education function to develop the ability and form the character and civilization of a dignified nation in order to educate the nation's life. This is in line with the values and norms of Indonesian society is far from materialism, But along with the influx of globalization and modernization, the value and meaning of education is often biased. The occurrence of bias in the interpretation of the meaning of education is caused by social change. research of education bias in Bima community gives an idea how education values can not be interpreted well by a society. Peter L Berger is one of the sociologists who discussed the whole process of social construction. Using the social construction theory of Peter L Berger, it can be seen that the people of Bima undergo a process of social change consisting of; (a) Changes in education patterns in Bima from Islamic education to secular education, (b) Conversion of society's high social status, related to education which is a social construction process in Bima society about one's social status. So from the analysis can be seen that education for the community Bima has a very important role in determining the position of a person's social status.

Keywords: Value of Education, Social Construction, Society of Bima

I. PENDAHULUAN

Berbicara konteks pendidikan saat ini tidak terlepas dari sistem pendidikan nasional dimana arah dan tujuan pendidikan nasional idealnya bertolak dari UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, BAB II Dasar, Fungsi, dan Tujuan Pasal 3 dimana:

“Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.”

Pada masa sekarang, sistem pendidikan di Indonesia berusaha untuk disesuaikan dengan landaskan ideologi & hukum negara modern seperti halnya Pancasila dan UUD 1945. Sehingga dalam peraturan perundang-undangan pun definisi pendidikan disesuaikan dengan arah ideologi negara seperti tertuang dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1 yang berbunyi:

“Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.”

Memperbandingkan definisi, fungsi dan tujuan pendidikan nasional dengan kondisi real dunia pendidikan nasional tentunya “jauh panggang dari api”. Dalam artian terlalu jauh memperbandingkan cita-cita pendidikan nasional yang bersifat ideal dengan ketercapaiannya saat ini. Meski demikian penting kiranya untuk melakukan kajian terkait bagaimana dampak pelaksanaan sistem pendidikan tersebut terhadap perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Mengingat pendidikan adalah aspek penting dalam merubah pola pikir masyarakat. Sehingga pengkajian bidang ilmu sosiologi tentang dampak pendidikan terhadap perubahan sosial masyarakat menjadi penting untuk menepohong terlaksana dengan baik atau tidaknya sebuah aktifitas pendidikan.

Pengkajian bidang ilmu sosiologi yang berkenaan dengan pendidikan merupakan bagian dari ruang lingkup sosiologi pendidikan. Dimana objek sosiologi pendidikan meliputi; (1) pendidikan berbasis kelokalan, (2) *Social group*, (3) stratifikasi sosial, (4) perubahan sosial dan perilaku sosial¹. Dari ke empat objek sosiologi pendidikan tersebut tulisan ini berkaitan dengan perubahan sosial dan perilaku sosial terkait stratifikasi sosial, yaitu konstruksi sosial yang terbentuk dalam stratifikasi sosial masyarakat Bima.

Masyarakat Bima adalah suku Mbojo yang tinggal propinsi Nusa Tenggara Barat. Mayoritas masyarakat Bima tinggal di Kabupaten Bima dan Kabupaten Dompu. Dari pengamatan yang penulis lakukan ada hal menarik yang ditangkap dari motivasi masyarakat Bima dalam menempuh pendidikan, khususnya pendidikan formal. Seperti yang penulis paparkan di bagian pendahuluan ini, antusiasme masyarakat Bima dalam menempuh pendidikan terbilang besar, beberapa orang yang sempat ditemui mengakui salah satu motivasinya dalam menempuh pendidikan terkait dengan status sosial dalam masyarakat. Padahal idealnya tujuan dari pendidikan adalah mendapatkan ilmu pengetahuan, atau juga bisa untuk mendapatkan keahlian tertentu, sehingga dari keahliannya tersebut seseorang bisa mendapatkan kehidupan yang layak. Ada pun status sosial dalam masyarakat umumnya hanya merupakan dampak saja dari pendidikan tersebut, tapi pada asumsi sebagian besar masyarakat Bima, status sosial justru merupakan tujuan dari pendidikan mereka di perguruan tinggi.

Dalam tulisan ini akan dibahas bagaimana masyarakat Bima memaknai definisi, fungsi dan tujuan pendidikan dalam kehidupan mereka. Selanjutnya akan digali pula bagaimana pemahaman tentang pendidikan tersebut terbentuk (terkonstruksi), sehingga bisa mengetahui faktor apa saja yang

mempengaruhi konstruksi sosial masyarakat Bima dalam memaknai pendidikan. Dari deskripsi tentang pemahaman terkait makna pendidikan tersebut bisa diambil penyimpulan tentang sudah tepat dan sejalan atau tidakkan tujuan pendidikan nasional dengan perkembangan masyarakat dari pemaknaan pendidikan di daerah Bima, dengan melihat pola perilaku, kebiasaan, serta pola pikir masyarakat Bima saat ini. Dari Rumusan masalah diatas dapat disusun beberapa poin tujuan dan manfaat penelitian sebagai berikut:

- a. Menjelaskan definisi, fungsi dan tujuan pendidikan dalam kehidupan masyarakat Bima,
- b. Menjelaskan proses konstruksi sosial masyarakat Bima dalam memaknai pendidikan.

II. METODE PENELITIAN

Metode kualitatif dapat digunakan untuk mempelajari, membuka dan mengerti apa yang terjadi di belakang setiap fenomena yang baru sedikit diketahui. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif. Penelitian ini menggambarkan nilai pendidikan pada masyarakat Bima.

Penelitian ini dilakukan terhadap (1.) Mahasiswa sebagai kalangan akademisi dan agen perubahan dalam masyarakat. (2) Orang tua dari mahasiswa tersebut. Lokasi penelitian berada di Kabupaten Bima. Penetapan fokus penelitian ini merupakan tahap yang sangat menentukan dalam penelitian kualitatif. Hal tersebut karena suatu penelitian kualitatif tidak dimulai dari sesuatu yang kosong atau tanpa adanya masalah, baik masalah-masalah yang bersumber dari pengalaman penelitian atau melalui pengetahuan yang diperolehnya melalui kepustakaan ilmiah. Jadi fokus dalam penelitian kualitatif sebenarnya merupakan masalah itu sendiri². Berpedoman pada konsep tersebut maka yang menjadi fokus

¹Silfia, Hanani. *Sosiologi Pendidikan Keindonesiaan*, (Jogjakarta: Ar-Ruzz Media 2013), hlm. 32-49

²Lexy, Meleong. *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002), hlm. 62.

dalam penelitian ini adalah: (1) definisi, fungsi dan tujuan pendidikan masyarakat Bima – Nusa Tenggara Barat, (2) proses konstruksi sosial masyarakat Bima dalam memaknai pendidikan.

Populasi atau *Universe* adalah jumlah keseluruhan dari unit analisis³. Populasi merupakan jumlah tertentu dari individu yang akan diselidiki oleh peneliti. Populasi dalam penelitian ini adalah semua masyarakat Bima yang menempuh pendidikan di Bima. Sampel yang diambil dari populasi dalam penelitian ini bukan sesuatu yang mutlak, artinya sampel yang akan diambil menyesuaikan dengan kebutuhan di lapangan. Dalam penelitian ini sampel berfungsi untuk menggali beragam informasi dan menemukan sejauh mungkin informasi penting. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 8 orang, yang diambil menggunakan teknik *purposive sampling* atau *sampling* bertujuan. Sampel diambil berdasarkan tiga pertimbangan (1) keikutsertaan subjek dalam program pendidikan formal, dan (3) hubungan kekeluargaan dengan subjek penelitian.

III. PEMBAHASAN

A. Tingkat Pendidikan Masyarakat Bima

Masyarakat Bima adalah masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang memadai hal tersebut ditunjukkan dari data-data BPS. Dari data BPS tahun 2012 angka pencari kerja di Kab. Bima adalah 9515 orang, terdiri dari 5948 wanita dan 3567 Pria. Dengan tingkat pendidikan yang beragam antara lain, 885 lulusan Sekolah dasar, 684 lulusan Sekolah menengah pertama, dan 1075 lulusan Sekolah menengah Atas, 6871 merupakan lulusan dari perguruan tinggi. Diantara pencari kerja yang menempuh pendidikan di perguruan tinggi 4639 diantaranya adalah Sarjana (S1) dan 58 diantaranya adalah Pascasarjana (S2). Data BPS tersebut menunjukkan 72,2% dari pencari kerja di Kab. Bima merupakan lulusan

³Yulius, Slamet. *Metode Penelitian Sosial*, (Surakarta: Uns Press, 2006), hlm. 40.

pendidikan di perguruan tinggi, dan 44,14% diantaranya adalah memiliki gelar Sarjana.

Antusiasme suatu masyarakat atau kelompok masyarakat dalam menempuh pendidikan tentu didorong oleh nilai-nilai yang terdapat dalam masyarakat tersebut, begitu pula pada nilai-nilai pendidikan masyarakat Bima. Nilai-nilai tersebut tidak mungkin muncul begitu saja, tentu mengalami perjalanan panjang berupa pengalaman kolektif pada masyarakat tersebut. Tidak berhenti pada tataran nilai dalam masyarakat saja, manusia sebagai makhluk yang memiliki akal pikiran juga memiliki kemampuan untuk melakukan penilaian dan interpretasi pada nilai-nilai yang ada dalam masyarakat tempat mereka tumbuh dan berkembang. Sehingga sejalan dengan asumsi tersebut masyarakat Bima pun tentu memiliki motif-motif tersendiri dalam menempuh pendidikan di perguruan tinggi baik motif yang sejalan dengan nilai-nilai dalam masyarakatnya maupun bertentangan dengan nilai-nilai dalam masyarakat sebagai bentuk interpretasi yang kurang tepat dari nilai yang ada dalam masyarakat.

Beranjak dari kekhasan manusia dalam melakukan penilaian dan interpretasi terhadap nilai-nilai yang berlaku umum tersebut, sehingga membuka kemungkinan tujuan pendidikan yang ideal mengalami bias pada pelaksanaannya. Hal tersebut dikarenakan penilaian dan interpretasi yang mendukung terbentuknya motif seseorang dalam bertindak, termasuk dalam kaitannya dengan motif tindakan seseorang menempuh pendidikan di perguruan tinggi. Dari tulisan ini penulis bermaksud memaparkan perspektif masyarakat Bima pada umumnya dan khususnya kalangan akademisi saat ini terkait motivasi mereka dalam menempuh pendidikan beserta keterkaitannya terhadap nilai-nilai pendidikan masyarakat Bima.

B. Pendidikan Bagi Masyarakat Bima

Pada masyarakat Bima ataupun di beberapa daerah lain di Indonesia, menjadi

pegawai negeri sipil (PNS) adalah cita-cita pendidikannya. Hal ini mengakibatkan sering terjadinya kecurangan dalam proses test calon pegawai negeri sipil (CPNS) di Bima.

Seseorang yang ingin anggota keluarganya menjadi PNS tidak segan-segan menggelontorkan dana puluhan bahkan ratusan juta rupiah untuk meloloskan anaknya pada seleksi CPNS. Bagi sebagian besar keluarga di Bima status PNS memiliki prestise tinggi di mata masyarakat. Stigma ini menjadi tidak baik dengan bergesernya nilai-nilai moral dalam masyarakat. Dimana ajaran agama harus menjadi faktor penting dalam pembentukan perilaku atau budaya pelaku pembangunan (masyarakat dan pejabat) dalam proses pembangunan⁴.

Masyarakat Bima yang memiliki nilai-nilai moral Islam menjadi masyarakat Bima dengan nilai-nilai pragmatis dan materialis. Kondisi masyarakat Bima bisa dikategorikan masyarakat peralihan, dari masyarakat tradisional menuju masyarakat modern. Masa-masa ini merupakan masa yang rentan dalam proses perubahan masyarakat, dimana belum ada nilai-nilai moral yang mapan dalam masyarakat. Kondisi ini berarti terjadinya pergeseran pola pikir dalam masyarakat.

Dalam masa-masa transisi seperti ini dibutuhkan kontrol sosial untuk menjaga penafsiran masyarakat terhadap realitas sosial, sehingga perubahan pola pikir masyarakat dari tradisional ke pola pikir modern tetap sesuai dengan nilai-nilai dan norma yang ada dalam masyarakat.

C. Terbentuknya Pemahaman Tentang Masyarakat Bima Tentang Pendidikan

Proses terbentuknya pemahaman masyarakat Bima tentang pendidikan dibagi dalam terdapat dua sub sebagai berikut, yaitu: fungsi ganda Status pendidikan di Bima dan proses perubahan sosial masyarakat Bima.

⁴Sofjan Alizar, Sam, Kegagalan Modernisasi Pembangunan di Indonesia: Sebuah Prespektif. (*Jurnal UNIERA*, Vol. 3, No. 1, 2014), Hlm. 111

1. Status Pendidikan sebagai Status Sosial Masyarakat Bima

a. Pendidikan Islam

Bima sudah mampu menampilkan ulama kelas dunia sejak 250 tahun silam. Figur legendaries yang mampu memikat hati banyak orang adalah Syekh Abdul Gani Bima (Al-Bimawi). Di samping itu, ada sejumlah ulama ternama. Mereka terbukti mampu menopang wibawa dan kebesaran Bima karena menempatkan diri sebagai tangki-tangki moral di masyarakat.

Dalam sejarah Bima, ulama memiliki peranan menentukan. Mereka menjadi bagian terpenting dari lembaga kerajaan. Nasihat-nasihat ulama merupakan salah satu dasar keputusan raja. Kerajaan pun mengangkat mufti. Raja mengeluarkan biaya besar untuk menyekolahkan kader-kader ulama hingga ke luar negeri. Biayanya diambil dari tanah kerajaan yakni Dana Ngaji.

Penghargaan masyarakat pun sangat tinggi pada ulama. Zaman gelap yang diliputi ritual-ritual animis yang kental hingga tahun 60-70-an di Bima, dikikis para ulama. Ulama memberi penerangan dan pencerahan. Hingga ada satu masa, masyarakat menjadi amat bangga bisa berguru atau mengaji pada ulama. Itu dicirikan oleh hubungan emosional yang kental antara guru-murid, dimana murid dianggap bagian dari keluarga.

Nama-nama berikut menjadi amat diakrabi. Sebut saja syekh Mahdali, KH Muhammad Amin, KH Husein, KH Said, KH Abdurahman Idris, KH Jasin, KH Abbas, KH Said (Ngali), KH A. Rasjid, KH Abdurahman Bandu, KH Karim, KH Gani Masykur, KH Usman Ismail. Mereka menjadi belahan jiwa dari masyarakat. Setiap mereka pergi berceramah ke desa-desa, mereka selalu dielu-elukan. Ulama lain yang pantas dikenang karena peranannya yang kuat adalah Syekh Subur, Syekh Abdulgani, Syekh Mansyur, Syekh Muhammad dan Sultan Muhammad Salahuddin (beliau merupakan Sultan sekaligus Ulama karena kedalaman ilmu agamanya, beliau pernah belajar agama di Kairo ibu kota Mesir)⁵.

⁵Muslimin, Hamzah, *Ensiklopedia Bima*. (Bima: Pemkab. Bima & Lenge Group, 2004), hlm. 57

b. Sekolah Sekuler

Setelah kerajaan bubar tahun 1950, hingga masa 1980-an, tidak ada kaderisasi ulama di Bima. Di satu sisi para ulama didikan kerajaan sudah mulai renta. Seiring dengan perjalanan waktu, satu per satu mereka pun wafat. Maka sejak tahun 80-an mulai terlihat tanda-tanda Bima mengalami krisis ulama⁶.

Di sisi lain, pendidikan sekuler kian dominan. Orang Bima bahkan cenderung memasukkan anak-anak mereka ke sekolah umum ketimbang sekolah agama. Hal ini dikarenakan fakta menunjukkan, kehidupan sebagai ulama tidak memberikan jaminan secara materil. Jauh berbeda dengan di era kesultanan yang menyediakan dana khusus untuk ulama. Sementara masyarakat kian dikuasai oleh hal-hal yang material dan bendawi. Saat ini kebanyakan keluarga di Bima tidak peduli jika anak gadisnya dilamar oleh ustad tapi kalau dipacari pegawai negeri senangnya bukan main. Bahkan seringkali seorang laki-laki (calon mantu) dibiayai sekolahnya hingga dia menjadi pegawai oleh satu keluarga perempuan.

2. Proses Perubahan (Konstruksi Sosial Orang Bima)

Perbandingan proses konstruksi sosial pada masyarakat Bima di masa lampau dan konstruksi sosial saat ini berguna untuk melihat adanya kesamaan pola penerimaan masyarakat terhadap pengaruh budaya luar. Pengaruh pertama adalah nilai-nilai pendidikan Islam dan pengaruh kedua berupa nilai-nilai pendidikan sekuler modern.

Suatu proses pemaknaan yang dilakukan oleh setiap individual terhadap lingkungan dan aspek diluar dirinya terdiri dari proses eksternalisasi, internalisasi dan Objektivasi. Eksternalisasi adalah penyesuaian diri dengan dunia sosiokultural sebagai produk manusia, obyektivasi adalah interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan atau mengalami proses institusionalisasi, dan internalisasi adalah individu mengidentifikasi

⁶Hamzah, *Ensiklopedia Bima*, hlm. 58

diri ditengah lembaga-lembaga sosial dimana individu tersebut menjadi anggotanya⁷.

a. Eksternalisasi

Di Bima profesi guru merupakan profesi yang memiliki nilai prestisius tinggi. Bagi masyarakat Bima seorang guru dianggap memiliki banyak ilmu dan pengetahuan yang luas. Bahkan terkadang dianggap memiliki kelebihan pengetahuan agama. Hal ini tidak mengherankan mengingat sebutan guru di Bima (mungkin juga di daerah lain) tidak hanya digunakan untuk profesi guru dalam pendidikan formal tapi juga dalam hal ilmu agama atau pun ilmu bela diri (silat).

Islam menyebar luas di seluruh nusantara, termasuk di Bima. Saat proses Islamisasi mulai berkembang dengan pesat di Bima, saat inilah yang merupakan proses penyesuaian diri masyarakat Bima terhadap agama Islam maupun pendidikan Islam.

Setelah masa kesultanan berakhir, Bima masuk ke dalam wilayah Indonesia. Dalam lingkungan Indonesia sebagai negara modern inilah proses pendidikan modern yang cenderung sekuler merubah pola pendidikan di Bima. Dari pendidikan Islam menjadi proses pendidikan formal yang sekuler.

Pengaruh budaya-budaya modern inilah yang merupakan faktor pendorong terjadinya perubahan sosial di Bima. Eksternalisasi nilai-nilai materialisme dari pendidikan modern terhadap masyarakat yang memiliki pendidikan modern sejatinya diimbangi dengan penguatan nilai moral berupa budaya Islam dalam masyarakat Bima.

b. Objektivasi

Masa kerajaan terutama awal masa kesultanan merupakan awal masuknya Islam pada masa itu kesultanan menggabungkan hukum adat dan hukum Islam, pendidikan Islam mulai dilembagakan oleh kesultanan. proses belajarnya pun diwadahi dengan baik oleh kesultanan. Dan dalam proses

⁷Argyo, Demartoto, *Teori Konstruksi Sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luckmann*. (Surakarta : <http://argyo.staff.uns.ac.id>. Universitas Sebelas Maret Surakarta, 2013), hlm. - (Online)

penyebarluasan pengetahuan Islam para kalangan terpelajar Islam merupakan tangan kanan dari pihak kesultanan.

Status sosial kalangan terpelajar Islam pada masa kesultanan merupakan status sosial yang cukup tinggi, mereka disegani karena dekat dengan kekuasaan dan dipercaya karena dianggap orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Dan pada masyarakat modern di Bima saat ini pola pikir rasional dan materialis berkembang dengan pesat, sehingga kecenderungan yang dulu menganggap kalangan terpelajar Islam merupakan orang yang memiliki status sosial tinggi menjadi mulai luntur, dan perlahan digantikan oleh anggapan bahwa kalangan terpelajar yang berlatar belakang pendidikan sekulerlah yang memiliki masa depan yang cerah dan wal hasil meningkat pula status sosialnya di mata masyarakat.

Persepsi masyarakat terkait status sosial tersebut didukung pula oleh perubahan birokrasi pemerintahan. Dimana pada masyarakat moderen orang-orang yang menempati posisi dalam birokrasi pemerintahan adalah orang-orang yang memiliki latar belakang pendidikan sekuler.

c. Internalisasi

Sejak masa kesultanan kalangan terpelajar menjadi kalangan elite di birokrasi kesultanan karena dianggap sebagai orang yang paling mengerti hukum agama. Dalam birokrasi kesultanan terdapat lembaga Syara dan lembaga Hadat. Dimana para ulama berada pada lembaga Syara yang bertugas merumuskan berbagai hukum dan aturan di wilayah kekuasaan kesultanan Bima. Sedangkan lembaga Hadat merupakan lembaga yang membantu sultan menjalankan roda pemerintahannya. Dengan menempati posisi penting dalam kesultanan, Elite terpelajar (Islam) tersebut pun menjadi naik status sosialnya dalam masyarakatnya.

Pada era pendidikan modern dimana pendidikan formal mulai tumbuh dan berkembang. Kalangan terpelajar dengan latar belakang pendidikan Islam perlahan

mulai tergantikan posisinya oleh Kalangan terpelajar dengan latar belakang pendidikan sekuler. Naiknya status sosial orang-orang yang berpendidikan sekuler tersebut yang kemudian di legitimasi oleh pengakuan dari masyarakat.

Dalam proses internalisasi dalam masyarakat Bima. Orang Bima yang menangkap realitas dimana pendidikan agama saja tidak cukup untuk mengangkat status sosialnya dalam masyarakat kemudian mengalihkan obsesi pendidikan yang ditempuhnya dengan menempuh pendidikan formal setinggi mungkin. Sehingga bagi orang Bima pendidikan tidak hanya tentang Ilmu pengetahuan, ijazah dan kebutuhan material saja, tetapi lebih kepada Status sosial dalam masyarakat.

d. Konstruksi Sosial

Konstruktivisme dilihat sebagai sebuah kerja kognitif individu untuk menafsirkan dunia realitas yang ada karena terjadi relasi sosial antara individu dengan lingkungan atau orang di sekitarnya. Individu kemudian membangun sendiri pengetahuan atas realitas yang dilihat itu berdasarkan pada struktur pengetahuan yang telah ada sebelumnya, inilah yang oleh Berger dan Luckmann disebut dengan konstruksi sosial⁸.

Serangkaian proses tersebut yang terdiri dari; (a.) Perubahan pola pendidikan di Bima dari pendidikan Islam ke pendidikan sekuler, (b.) perubahan persepsi masyarakat tentang prioritas pendidikan yang menganggap pendidikan formal lebih penting dari pendidikan Islam, (c.) perubahan persepsi masyarakat tentang kriteria status sosial yang tinggi, dimana seorang Guru sekolah lebih tinggi status sosialnya dari pada seorang ustad. Merupakan proses konstruksi sosial dalam masyarakat Bima tentang status sosial seseorang. Sehingga dari analisis yang dilakukan bisa dilihat bahwa pendidikan bagi masyarakat Bima memiliki peran yang sangat

⁸Peter, L Berger, & Thomas, Luckmann, *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Sebuah Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. (Terjemahan: Hasan Basari). (Jakarta: LP3ES, 1990), hlm. 66

penting dalam menentukan posisi status sosial seseorang.

IV. KESIMPULAN

Dengan menggunakan teori konstruksi sosial Peter L Berger, dapat dilihat bahwa masyarakat Bima mengalami proses perubahan sosial yang terdiri dari; (a.) Perubahan pola pendidikan di Bima dari pendidikan Islam ke pendidikan sekuler, (b.) Perubahan persepsi masyarakat tentang status sosial yang tinggi, terkait pendidikan yang merupakan proses konstruksi sosial dalam masyarakat Bima tentang status sosial seseorang. Sehingga dari analisis yang dilakukan bisa dilihat bahwa pendidikan bagi masyarakat Bima memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan posisi status sosial seseorang.

Menyikapi perubahan sosial dalam masyarakat tersebut, membangun pendidikan di Bima sejatinya harus memperhatikan arah rencana pembangunan daerah. Era otonomi daerah mempunyai visi besar dalam membangun kemandirian pembangunan di daerah, dan untuk usaha pembangunan dibutuhkan program pengembangan Pendidikan yang sejalan dengan pembangunan daerah. Sehingga dibutuhkan kesamaan persepsi antara lembaga pendidikan di Bima dari tingkat sekolah dasar dan menengah hingga perguruan tinggi dengan pemerintah daerah dalam hal visi pengembangan daerah yang menjadi acuan pendidikan di daerah.

Usulan kedua setelah kesamaan persepsi antara lembaga pendidikan dan pemerintah daerah adalah membangun pendidikan yang mengacu pada kesadaran masyarakat, sehingga pendidikan sebagai media pembebasan bisa berjalan dengan baik. Penting untuk memastikan pendidikan tidak menjadi alat penindasan oleh penguasa atau golongan-golongan yang ingin melakukan eksploitasi terhadap masyarakat. Untuk kepentingan tersebut pada bab berikutnya akan dibahas tentang bagaimana konsep pendidikan yang membangun kesadaran seharusnya dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

- Berger, Peter. L & Luckmann, T. *Tafsir Sosial Atas Kenyataan: Sebuah Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*. (Terjemahan: Hasan Basari). Jakarta: LP3ES, 1990.
- BPS. *Bima Dalam Angka 2012*. Bima: Badan Pusat Statistik Kabupaten Bima & CV Maharani, 2012.
- Demartoto, Argyo. *Teori Konstruksi Sosial dari Peter L. Berger dan Thomas Luckmann*. (Online). Diposng 10 April 2013, diakses: 3 Januari 2015. (<http://argyo.staff.uns.ac.id/2013/04/10/teori-konstruksi-sosial-dari-peter-l-berger-dan-thomas-luckman/>). Universitas Sebelas Maret Surakarta. 2013.
- Hanani, Silfia. *Sosiologi Pendidikan Keindonesiaan*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2013.
- Hamzah, Muslimin. *Ensiklopedia Bima*. Bima: Pemkab. Bima & Lengge Group, 2004.
- Meleong, Lexy. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosda Karya, 2002.
- Sam, Sofjan Alizar. Kegagalan Modernisasi Pembangunan di Indonesia (Sebuah Prespektif). *Jurnal UNIERA*, Vol. 3, No. 1, 2014.
- Slamet, Yulius. *Metode Penelitian Sosial*. Surakarta: UNS Press, 2006.
- , UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL. Bab I Pasal 1, Definisi Pendidikan.
- , UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2003 TENTANG SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL. Bab I Pasal 1, Definisi Pendidikan Formal.

-----, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI Pasal 18 poin 4. Lulusan program sarjana berhak menggunakan gelar sarjana.

-----, UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI Paragraf 4 Pasal 26 (Ketentuan Gelar Akademik, Gelar Vokasi, dan Gelar Profesi)

-----, PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 49 TAHUN 2014 TENTANG STANDAR NASIONAL PENDIDIKAN TINGGI Pasal 24 Poin 5 – hak-hak Mahasiswa yang dinyatakan lulus.